

Judul : DPR Dorong BBM Satu Harga
Tanggal : Selasa, 20 Maret 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

DPR Dorong BBM Satu Harga

JAKARTA- DPR RI meminta Program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo segera direalisasikan. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji parlemen siap membantu BPH Migas dalam menyukseskan program tersebut.

Bamsoet panggilan Ketua DPR ini menjelaskan, hingga kini sudah ada 59 titik Program BBM Satu Harga. Pemerintah ucapnya, menargetkan 73 titik Program BBM Satu Harga hingga akhir 2018 yang terdiri atas 67 titik milik Pertamina dan 6 titik milik swasta.

Bamsoet memahami target ini tidak mudah direalisasikan oleh BPH Migas. Namun dengan kerja keras dan dukungan semua pihak ia berkeyakinan

program BBM Satu Harga akan dapat diwujudkan oleh BPH Migas. "Saya yakin program BBM Satu Harga bisa teralisasi di berbagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal," kata Bamsoet saat menerima Komite BPH Migas yang dipimpin M. Fanshurullah Asa di Ruang Pimpinan DPR, Jakarta, Senin (19/3).

"Saya optimis pemerintah bisa memenuhi target 73 titik Program BBM Satu Harga. DPR siap menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, PT Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat hukum agar berbagai masalah teknis dalam mewujudkan BBM Satu Harga bisa terselesaikan secara cepat dan cermat," janjinya.

Dalam kesempatan yang sama Bamsoet

berharap pemerintah dapat mempermudah perizinan bagi Sub Penyalur BBM. Kehadiran Sub penyalur menurutnya dapat menghilangkan pengecer ilegal yang seringkali menaikkan harga BBM seenaknya. Sub penyalur dipandanginya sekaligus menjadi jalan keluar menjangkau jaringan SPBU di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan investasi yang lebih terjangkau.

"Kehadiran Sub Penyalur menjadi terobosan yang bagus. Terlebih ini terbuka bagi koperasi maupun badan usaha desa. Tinggal bagaimana pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," Bamsoet berpesan.

Mantan Ketua Komisi III ini menyampaikan DPR dan BPH Migas akan mem-

pelajari lebih lanjut apakah kehadiran Sub Penyalur bisa dimungkinkan terlaksana dengan sumber Dana Desa. Terlebih untuk menjadi Sub Penyalur investasi yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 50-100 juta. Jauh lebih murah dibanding harus membuat SPBU yang mencapai 20 miliar. "Program 1 miliar per desa dimaksudkan untuk merangsang dan membantu perekonomian di desa. Jika hasil musyawarah di Bumdes memungkinkan pembentukan Sub Penyalur melalui alokasi Dana Desa, kenapa tidak?" papar Bamsoet.

"Minimal satu desa satu Sub Penyalur BBM, akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di pedesaan menjangkau BBM Satu Harga," imbuhnya. (dil)